



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Masalah Banjir di DKI yang Tak Kunjung Teratasi

MASALAH banjir di Jakarta tak kunjung menemukan solusi. Gonta-ganti gubernur, belum ada yang mampu menyelesaikan masalah yang terus menerjang DKI Jakarta ini.

Konon, masalah banjir sudah ada sejak zaman Belanda. Namun, berbagai upaya yang telah dilakukan, tak juga membuahkan hasil. Beberapa waduk dibangun, dengan tujuan untuk menahan datangnya air bah, juga tak efektif.

Upaya normalisasi sungai yang digerakkan pemerintah pusat, juga belum membuahkan hasil. Banjir masih menjadi momok yang selalu mengancam sejumlah wilayah Jakarta. Salah satunya di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Meski telah berhasil normalisasi sungai, namun banjir tetap melanda. Banjir akibat kiriman air dari Bogor.

Kali Sunter di Kelurahan Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, saat ini sedang dilakukan normalisasi. Namun terkendala dengan pembebasan lahan. Hingga kini masih di bawah angka 50 persen. Padahal, upaya normalisasi di lokasi tersebut sudah sejak tahun 2014 lalu. Namun, kini belum ada kelanjutannya.

Hal yang sama juga terjadi dalam proses normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan. Pembebasan lahan juga menjadi kendala utama. Lantaran lahan di lokasi statusnya sebagai tanah garapan dan tanah wakaf.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tanah Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI, Roedito, mengatakan bahwa pihaknya masih terus mengupayakan pembebasan lahan di lokasi tersebut. "Untuk pembebasan lahan di Rawajati masih on proses ya," katanya.

Tersendatnya pembebasan lahan aliran Kali Ciliwung, juga terjadi di kawasan Gang Arus, Cawang, Jakarta Timur. Dinas SDA DKI mengklaim, pembebasan sudah mencapai 98 persen atau 13.182 meter persegi. Tersisa lahan yang

kini merupakan tanah wakaf.

Rinciannya, Jakarta Timur meliputi Kelurahan Cililitan (0,8 hektare), Kelurahan Cawang (2,25 hektare), dan Kampung Melayu (1,95 hektare). Sedangkan untuk Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, yang akan dibebaskan seluas 1,5 hektare.

Proyek Sumur Resapan

Di era gubernur Anies Baswedan, Pemprov DKI menggencarkan pembuatan sumur resapan. Pada tahun 2021 lalu, Pemprov DKI membangun 25.647 titik sumur resapan. Program ini semula akan dilanjutkan pada tahun 2022 dan sudah diajukan anggaran Rp 322 miliar untuk membangun 26.000 sumur resapan. Namun pengajuan anggaran tersebut tak disetujui DPRD. Hingga akhirnya dikurangi menjadi Rp 120 miliar rupiah.

Program yang masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini, dinilai tidak efektif menangani banjir. Apalagi, beberapa pengamat mengungkapkan bahwa tanah di Ibu Kota kebanyakan telah jenuh dan tidak bisa menyerap air

lagi.

Belum lagi, dugaan adanya kejanggalan dalam proyek ini. Misalnya, soal pembuatan 266 sumur resapan di Kepulauan Seribu, yang menelan biaya sebesar Rp 184.072.000. Pembuatan sumur resapan di Kepulauan Seribu dianggap tak ada kaitannya dengan masalah banjir di daratan Jakarta.

Meski tak mendapat anggaran untuk tahun 2022, Pemprov DKI memastikan pembangunan sumur resapan tetap bergulir. Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyatakan bahwa pihaknya akan melibatkan pihak swasta hingga masyarakat dalam pembuatan sumur resapan.

"Yang akan lebih digalakkan adalah kolaborasi pelaksanaan drainase vertikal oleh pihak non-Pemprov (swasta, masyarakat, lembaga pemerintahan lain) yang memegang porsi lebih besar," kata Riza, Kamis (2/12/2021) silam.

Riza menyebut saat ini 8,9 persen aset sumur resapan di Ibu Kota dipegang oleh Pemprov DKI, 35 persen pihak swasta, dan 53 persen oleh masyarakat. (ifand)